

Abstrak

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris” (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT) bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penegakan hukum yang dilakukan oleh notaris yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek putusan MPW Notaris DKI Jakarta. Teori kepastian hukum, penegakan hukum dan kewenangan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Penegakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penegakan hukum secara administrasi karena sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris hanya berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020. Sedangkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang merasa dirugikan dengan adanya teguran tertulis tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT yang dimenangkan oleh Notaris selaku Penggugat. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan sanksi kepada seorang Notaris berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020 adalah produk Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya pejabat administrasi negara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya asas bertindak cermat dan permainan yang layak agar putusan yang diberikan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Kata-kata Kunci : Penegakan hukum, kewenangan, Majelis Pengawas Notaris;Tata Usaha Negara

Abstract

The research entitled "Law Enforcement on the Authority of the Notary Regional Supervisory Council that Gives Written Warnings to Notaries" (Case Study Decision Number 190/G/2020/PTUN.JKT) aims to determine law enforcement carried out by the DKI Notary Regional Supervisory Council (MPW) Jakarta by giving administrative sanctions in the form of a written warning and law enforcement by a notary who is harmed by filing a lawsuit to the State Administrative Court with the object of the decision of the MPW Notary DKI Jakarta. The theory of legal certainty, law enforcement and the authority to analyze the problem under study. This research is juridical normative, with qualitative analysis, while to examine legal issues, primary legal materials are used, and secondary legal materials, especially State Administrative Court decisions. The results of the study concluded, Law enforcement carried out by the Supervisory Council of the Notary Region of DKI Jakarta Province is an administrative law enforcement because the sanctions given to a Notary are only in the form of a written warning as stated in Decision Number: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, dated September 14, 2020. Meanwhile, law enforcement carried out by a Notary who feels aggrieved by the written warning is to file a lawsuit to the State Administrative Court in Register Number: 190/G/2020/PTUN-JKT which was won by Notary as the Plaintiff. The authority of the Supervisory Board of the Notary Region of DKI Jakarta Province which was obtained based on the delegation of authority from the Minister of Law and Human Rights who had given a sanction to a Notary in the form of a written warning as stated in Decision Number: 05/PTS/Mj.PWN.Prov. DKI Jakarta / IX/2020, dated September 14, 2020 is a product of Ta State Administration which is the object of the State Administrative Court in accordance with Article 53 paragraph (2) of the Administrative Court Law. This study suggests that state

administration officials should pay attention to the general principles of good governance. In particular, the principle of acting carefully and playing a proper game so that the decision given does not violate the provisions of the applicable laws and regulations

Keywords: Law enforcement, authority, Notary Supervisory Council; State Administration